



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02B/DPR RI/II/2010-2011

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS  
TAHUN 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Juncto Pasal 5 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, Juncto Pasal 60 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2011;
- b. bahwa menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5043);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 15 tanggal 14 Desember 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2011**

**PERTAMA** : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI;
6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Ketua Fraksi PD, Fraksi PG, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura;
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI;
10. Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI;
11. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Desember 2010  
Ketua,  
ttd

DR. H. MARZUKI ALIE

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 02B/DPR RI/II/2010-2011  
TANGGAL : 14 DESEMBER 2010

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS  
TAHUN 2011**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	Komisi I
2	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	DPR	Komisi II
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	DPR	Komisi III
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	Komisi III
5	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR	Komisi IV
6	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR	Komisi IV
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan	DPR	Komisi IV
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	DPR	Komisi V
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	Komisi V
10	RUU tentang Pencarian dan Pertolongan	DPR	Komisi V
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	Komisi VII
12	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR	Komisi VIII
13	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR	Komisi VIII

14	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	DPR	Komisi VIII
15	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR	Komisi VIII
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR	Komisi IX
17	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	Komisi IX
18	RUU tentang Tenaga Kesehatan	DPR	Komisi IX
19	RUU tentang Keperawatan	DPR	Komisi IX
20	RUU tentang Kebudayaan	DPR	Komisi X
21	RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR	Komisi X
22	RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi	DPR	Komisi X
23	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	Komisi X
24	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR	Baleg
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	Baleg
26	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	Baleg
27	RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan	DPR	Baleg
28	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR	Baleg
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	Baleg
30	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR	Baleg
31	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR	Baleg
32	RUU tentang Daerah Perbatasan	DPR	Baleg

33	RUU tentang Penanganan Konflik Sosial	DPR	Baleg
34	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	DPR	Baleg
35	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR	Baleg
36	RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan	DPR	Baleg
37	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR	Baleg
38	RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	Pemerintah	Badan Pertanahan Nasional
39	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Pemerintah	Kementerian Agama
40	RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemerintah	Kementerian Dalam Negeri
41	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah	Kementerian Dalam Negeri
42	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	Pemerintah	Kementerian Dalam Negeri
43	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	Pemerintah	Kementerian Dalam Negeri
44	RUU tentang Desa	Pemerintah	Kementerian Dalam Negeri
45	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pemerintah	Kementerian Hukum dan HAM
46	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintah	Kementerian Hukum dan HAM
47	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintah	Kementerian Hukum dan HAM
48	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pemerintah	Kementerian Hukum dan HAM
49	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Pemerintah	Kementerian Hukum dan HAM
50	RUU tentang Perampasan Aset	Pemerintah	Kementerian Hukum dan HAM
51	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Pemerintah	Kementerian Hukum dan HAM
52	RUU tentang Hak Kekayaan Industri	Pemerintah	Kementerian Hukum dan HAM
53	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	Pemerintah	Kementerian Keuangan

54	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Pemerintah	Kementerian Keuangan
55	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pemerintah	Kementerian Keuangan
56	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	Pemerintah	Kementerian Keuangan
57	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	Pemerintah	Kementerian Keuangan
58	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	Pemerintah	Kementerian Keuangan
59	RUU tentang Konvergensi Telematika	Pemerintah	Kementerian Komunikasi dan Informatika
60	RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	Pemerintah	Kementerian Komunikasi dan Informatika
61	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemerintah	Kementerian Komunikasi dan Informatika
62	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	Pemerintah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
63	RUU tentang Perdagangan	Pemerintah	Kementerian Perdagangan
64	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pemerintah	Kementerian Perhubungan
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	Pemerintah	Kementerian Perindustrian
66	RUU tentang Rahasia Negara	Pemerintah	Kementerian Pertahanan
67	RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional	Pemerintah	Kementerian Pertahanan
68	RUU tentang Keamanan Nasional	Pemerintah	Kementerian Pertahanan
69	RUU tentang Keantariksaan	Pemerintah	Kementerian Riset dan Teknologi/ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

70	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------

<b>DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA</b>	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

KETUA,

ttd

DR. H. MARZUKI ALIE.,

LAMPIRAN I

**DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
YANG DILUNCURKAN PEMBAHASANNYA  
DARI PROLEGNAS PRIORITAS  
TAHUN 2010 KE TAHUN 2011**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	RUU tentang Bantuan Hukum	DPR	Pembicaraan Tingkat I
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR	Pembicaraan Tingkat I
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	Pembicaraan Tingkat I
4	RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	Pembicaraan Tingkat I
5	RUU tentang Mata Uang	DPR	Pembicaraan Tingkat I
6	RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR	Pembicaraan Tingkat I
7	RUU tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR	Pembicaraan Tingkat I
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	DPR	Pembicaraan Tingkat I
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	DPR	Pembicaraan Tingkat I
10	RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPR	Harmonisasi
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.	DPR	Harmonisasi
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.	DPR	Harmonisasi
13	RUU tentang Intelijen	DPR	Harmonisasi
14	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	DPR	Harmonisasi
15	RUU tentang Komponen Cadangan	Pemerintah	Pembicaraan



<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH</b>	<b>KETERANGAN</b>
	Pertahanan Negara		Tingkat I
16	RUU tentang Keimigrasian	Pemerintah	Pembicaraan Tingkat I
17	RUU tentang Transfer Dana	Pemerintah	Pembicaraan Tingkat I
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	Pemerintah	Pembicaraan Tingkat I
19	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan	Pemerintah	Pembicaraan Tingkat I
20	RUU tentang Akuntan Publik	Pemerintah	Pembicaraan Tingkat I
21	RUU tentang Informasi Geospasial	Pemerintah	Pembicaraan Tingkat I

KETUA,

ttd

DR. H. MARZUKI ALIE,